

**ANALISIS AKSES MASYARAKAT DKI JAKARTA TERHADAP AIR
BERSIH PASCA PRIVATISASI AIR TAHUN 2009-2014**

Oleh :

Rr. Marsya Nivita Ardelia - 14010111130054

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Clean water is one of the human basic needs and Nation should fulfill their citizen basic needs. DKI Jakarta Province, as Capital City of Indonesia, encounter clean water crisis which made the citizen have been hard to getting access to clean water. Therefore, the government proposed cooperation with private partners to improve DKI Jakarta citizen access to clean water through Water Privatization Policy. For that, the authors conducted research to discover the success of Water Privatization Policy in order to improve DKI Jakarta Citizen access to clean water after privatization of water.

The approach used in this research is descriptive qualitative with interviews data collection methods and document study. Subject were Public Water Company in DKI Jakarta (PAM JAYA).

The result showed that Water Privatization Policy in DKI Jakarta Province was failed because after the matter in cooperation with the private partners, the citizen access to clean water decreases. It is caused by the performance of private partners that are not optimal in serving the needs of clean water citizen of DKI Jakarta Province.

So the authors conclude the need for this research as an evaluation of Government of DKI Jakarta Province for more leverage in providing water service to the citizen of DKI Jakarta Province.

Keyword : Clean Water, Water Privatization, Public Private Partnership

PENDAHULUAN

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Tanpa air makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Manusia dapat hidup beberapa hari tanpa adanya makanan namun manusia tidak akan bertahan jika tidak minum karena 73% zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Hal tersebut menggambarkan betapa pentingnya air bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup terutama manusia.

Air yang relatif bersih merupakan kebutuhan pokok manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya.

Air bersih merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Namun tidak semua masyarakat mendapatkan akses terhadap air bersih contohnya seperti di Asia Tenggara. Hanya sebagian besar masyarakat di Asia Tenggara yang termasuk ke dalam kelompok pengguna air bersih. Berikut adalah data pengguna air bersih di Asia Tenggara sampai dengan tahun 2011 (dalam persentase):

Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Air Bersih di Asia Tenggara

No	Nama Negara	2008	2009	2010	2011
1	Indonesia	74	74	74	76
2	Malaysia	99	99	99	99
3	Myanmar	74	76	78	79
4	Filipina	91	91	92	92
5	Thailand	95	95	95	95

Sumber: *World Bank* (2012)

Jika dilihat dari data yang diperoleh, pengguna air bersih di Asia Tenggara meningkat dari tahun ke tahun begitu pula di Indonesia. Meskipun begitu, Indonesia masih mengalami kelangkaan air bersih, terutama di kota-kota besar seperti DKI Jakarta.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat DKI Jakarta, pemerintah memberikan prioritas pada sektor air bersih yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PAM JAYA) untuk melakukan penanganan seperti memanfaatkan kapasitas produksi, peningkatan operasi dan pemeliharaan melalui rehabilitas yang ada, serta peningkatan kapasitas produksi dan perluasan jaringan karena menyangkut kehidupan masyarakat umum. Walaupun prioritas penangan air bersih telah diberikan kepada PAM, namun tidak jarang pula masyarakat sering mengeluh air yang disalurkan PAM sering macet dan keruh. Masyarakat di beberapa wilayah pelayanan akhirnya hanya menggunakan air PAM untuk mandi dan mencuci. Sedangkan untuk minum dan memasak mereka mengeluarkan uang ekstra untuk membeli AMDK (Air Minum Dalam Kemasan).

Untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan air bersih, maka pada tahun 1997 pemerintah memutuskan untuk bekerja sama dengan dua mitra operator swasta asing untuk mengelola dan menyediakan air bersih untuk warga DKI Jakarta yang berlaku selama 25 tahun. Kedua pihak tersebut adalah PT AETRA Jakarta dan pihak lainnya adalah Ordeo Suez Lyonnaise de Eaux (PT. PALYJA) yang berasal dari Perancis.

Sistem kerjasama pemerintah dengan swasta dalam bidang pengelolaan air bersih merupakan suatu kebijakan baru pemerintah yang bernama privatisasi air. Privatisasi air pun telah tercantum pada UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Setelah 16 tahun privatisasi berjalan, pengelolaan dan penyediaan air bersih belum menunjukkan hasil yang signifikan¹.

Kebijakan privatisasi air merupakan suatu kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan dan mempermudah akses masyarakat terhadap air bersih. Namun demikian, masih terdapat masyarakat di beberapa daerah bagian Jakarta yang kesulitan mendapatkan air bersih. Sulitnya akses terhadap air bersih menyebabkan masyarakat terutama masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah harus membeli air dengan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya yaitu sekitar Rp 5.000,00 - Rp 10.000,00. Kondisi ini mengharuskan

¹ BAPPENAS. 2011. "*Ironi Air di Indonesia Menyikapi Potensi Perang Air Belajar Tentang Air dari Swedia*" Sustaining Partnership Media (Desember) Jakarta. Hlm.6

masyarakat memilih untuk mengkonsumsi air tanah yang tidak layak atau berebut air PAM dengan harga yang diatas rata-rata.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti Akses Masyarakat DKI Jakarta Terhadap Air Bersih Pasca Privatisasi Air. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan dari Kebijakan Privatisasi Air di Provinsi DKI Jakarta.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Public Private Patnership* (PPP) dan Privatisasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berdasarkan pada penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM JAYA). Data – data yang penulis peroleh adalah data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumen yang kemudian dianalisis dengan melakukan reduksi data dan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keputusan Pemerintah Pusat (Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor IK.03.03MN/260 tanggal 19 Juli 1995) untuk melakukan kerjasama dengan mitra swasta dilatarbelakangi oleh pelayanan PAM JAYA yang kurang maksimal. Pada masa sebelum diberlakukannya privatisasi air, Jakarta membutuhkan percepatan pemenuhan kebutuhan air minum karena terjadinya pertumbuhan penduduk yang meningkat tinggi². Percepatan ini membutuhkan investasi yang sangat besar sehingga Pemerintah memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan mitra swasta sebagai investor sehingga percepatan ini dapat tercapai. Selain percepatan pelayanan, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk diberlakukannya kebijakan privatisasi air yaitu kualitas air Jakarta yang buruk dan meningkatkan serta membenahi operasional baik operasional para pegawai dan staff PAM JAYA ataupun operasional dalam produksi, distribusi, pelayanan pelanggan dan sebagainya.

Untuk memperbaiki pelayanan dalam sektor air bersih, maka Pemerintah memutuskan untuk bekerjasama dengan dua mitra swasta, perusahaan pertama

²Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dadang Teguh Suhartono, Manajer Sub Divisi Humas PAM JAYA pada hari Kamis, 20 november 2014 pukul 12.14 WIB

adalah PT Kekarpola Thames Airindo (KATI) yang bekerjasama dengan RWE Thames Water (PT Aetra). RWE Thames Water merupakan anak perusahaan Inggris Thames Water. Thames Water pada saat itu menggandeng putra sulung Soeharto, Sigit Harjojudanto. Perusahaan kedua adalah PT Garuda Dipta Semesta yang bekerjasama dengan Ordeo Suez Lyonnaise de Eaux (PT Palyja). Suez-Lyonnaise merupakan perusahaan milik konglomerat Perancis, Suez. Suez bekerjasama dengan Salim Group. Salim Group adalah perusahaan konglomerat terbesar di Indonesia yang dikelola oleh Anthony Salim yang merupakan anak dari anak Sudono Salim (kroni Soeharto)³.

Kesepakatan kerjasama dengan mitra swasta telah ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 1995 dan penandatanganan kontrak secara resmi telah ditandatangani pada tanggal 6 Juni 1997 yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Februari 1998. Kontrak tersebut juga membagi pembagian saham bagi kedua mitra. Pembagiannya adalah 20% menjadi milik PT Kekarpola Thames Airindo dan 80% menjadi milik Thames Water sedangkan PT Garuda Dipta Semesta mendapat 60% dan Suez-Lyonnaise mendapat 40%. Namun kepemilikan saham tersebut tidak berlangsung lama. Tanggal 17 Juli 1998 PT Garuda Dipta Semesta menjadi PT PAM Lyonnaise Jaya (PT Palyja) dengan 100% saham dimiliki oleh Suez Lyonnaise de Eaux kemudian menyusul KATI yang mengganti nama menjadi PT Thames PAM Jaya (TPJ) dengan komposisi saham 5% dimiliki oleh PT Kekarpola Airindo dan 95% oleh PT Thames Water Overseas Ltd. yang kemudian menjadi RWE Thames Water. Tanggal 22 Oktober 2001 saat Perjanjian Kerjasama ditandatangani, dinyatakan bahwa Pihak kedua untuk PT Palyja adalah Ondeo Services yang sebelumnya dikenal sebagai Suez Lyonnaise des Eaux dan PT Bangun Tjipta Sarana. Sementara Pihak kedua untuk TPJ adalah Thames Water Overseas Ltd. dan PT Tera Meta Phora⁴.

Kontrak perjanjian kerjasama tidak hanya membahas pembagian kepemilikan saham. Kontrak juga membahas pembagian tugas dan wilayah pelayanan masing-masing mitra swasta. Wilayah pelayanan dibatasi oleh sungai

³ AMRTA Institute. "Amandemen Kontrak Konsensi Air di Jakarta". Hlm 1

⁴ *Ibid.*

ciliwung. Wilayah timur sungai Ciliwung adalah wilayah operasional PT Aetra sedangkan wilayah barat sungai Ciliwung adalah wilayah operasional PT Palyja.

Berlakunya kebijakan Privatisasi air mengalami hambatan dikarenakan terjadinya krisis ekonomi dan politik yang terjadi bersamaan dengan masa dimulainya perjanjian. Terdapat beberapa kesepakatan yang tidak dapat dicapai terutama asumsi finansial yang telah diperhitungkan sebelumnya. Karena itu, tanggal 1 Juni 1998, semua pihak baik pihak pemerintah, swasta dan PAM JAYA sepakat untuk kembali merundingkan kontrak tersebut. Dua komponen utama kembali dirundingkan yaitu tarif air dan target teknis. Kontrak tersebut diamandemen dan secara resmi ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2001. Amandemen kontrak dilakukan kembali pada bulan Juni 2005 untuk membahas dan melakukan penghitungan ulang untuk imbalan/biaya air (*water change*), biaya bantuan teknis dan implementasi kenaikan tarif otomatis sebagaimana yang telah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta⁵.

1. Sistem Kerjasama PAM JAYA dan Mitra Swasta

Kerjasama PAM JAYA dengan mitra swasta dilaksanakan secara intensif melalui tim-tim yang dibentuk antar departemen (Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Bappenas dan Pemerintah Daerah).

Sistem kontrak kerjasama antara PAM JAYA dengan Mitra berbentuk konsensi yang berlaku selama 25 tahun (1998-2022). Sistem kerjasama ini bukan merupakan pengalihan kepemilikan saham kepada mitra swasta maupun pembentukan saham patungan tetapi dalam bentuk kerjasama pengelolaan dan pembangunan penyediaan air bersih di Jakarta⁶.

Dalam kurun kerjasama PAM JAYA menyerahkan asset dan hak pengelolaan pelayanan air minum seluruh wilayah pelayanan PAM JAYA

⁵ Shofiani, Nur Endah. "*Privatisasi PAM JAYA: Studi Kasus di Jakarta Bagian timur, indonesia*". http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/20/30/Artikel/Privatisasi_PAM_Jaya_Studi_Kasus_di_Jakarta_Bagian_Timur_Indonesia.html, diakses tanggal 25 Mei 2015 pukul 11.32 WIB

⁶ Sumber berasal dari presentasi PAM JAYA

kepada Operator Mitra Swasta untuk mengoperasikan, memelihara dan mengembangkan sistem penyediaan air minum di DKI Jakarta, sesuai dengan target teknis dan standar pelayanan yang ditetapkan. Mitra Swasta harus mengoperasikan aset dalam keadaan baik sesuai dengan *Good Operating Practice* dan beban depresiasi aset yang diserahkan/dikelola tersebut dibebankan kepada PAM JAYA.

Pada akhir kerjasama seluruh sistem dan aset akan dikembalikan ke PAM JAYA. Jika terdapat sisa nilai buku pada aset tersebut, maka PAM JAYA harus membayar sesuai dengan nilai tersebut.

2. Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih

Salah satu hak asasi manusia dan masyarakat yang menetap dalam sebuah negara adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM JAYA). Pemerintah melalui Perda DKI Jakarta Nomor 11 tahun 1993 tentang Pelayanan Air Minum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengatur sistem pelayanan air bersih kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh PAM JAYA.

Pada dasarnya seluruh masyarakat DKI Jakarta telah mendapatkan akses terhadap air bersih dengan metode yang berbeda-beda. Sampai saat ini, PAM JAYA telah melayani 60% atau sekitar 8 juta masyarakat DKI Jakarta secara langsung melalui pipa PAM JAYA sedangkan 40% lainnya mendapatkan akses air bersih melalui air tanah, hidran air, master meter dan kios air.⁷

1. Masyarakat Pengguna Air PAM dan Air Tanah

Melalui hasil wawancara dengan pihak PAM JAYA diketahui bahwa PAM JAYA telah melayani 60% masyarakat DKI Jakarta. Selain jaringan PAM JAYA, masyarakat mendapatkan akses air bersih

⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Dayanto, Manajer Sub Divisi Pelanggan PAM JAYA pada hari Kamis, 27 November 2014 pukul 9.56 WIB

dengan menggunakan air tanah melalui pompa listrik. Tidak jarang juga diantara mereka menggunakan air tanah dan air PAM secara bersamaan.

2. Masyarakat Pengguna Hidran Umum, Master Meter dan Kios Air

Selain menggunakan sambungan air PAM dan air tanah, terdapat masyarakat yang mendapatkan akses air bersih melalui hidran umum, master meter dan kios air. Ada perbedaan bagi masyarakat pengguna air PAM dan masyarakat pengguna hidran umum, master meter dan kios air. Perbedaannya adalah masyarakat pengguna PAM adalah masyarakat yang murni ingin mendapat pelayanan dari PAM. Masyarakat pelanggan PAM merupakan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas dan terbagi menjadi beberapa kelompok pelanggan PAM JAYA. Sedangkan masyarakat pengguna hidran umum, master meter dan kios air adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau yang dikenal dengan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Hidran umum, master meter dan kios air merupakan program PAM JAYA untuk melayani MBR yang sulit mendapatkan akses terhadap air bersih. Karena program ini ditujukan khusus untuk MBR dan merupakan bukti pengabdian PAM JAYA terhadap masyarakat DKI Jakarta maka keuntungan yang didapatkan PAM JAYA sangat kecil bahkan tidak jarang juga PAM JAYA merugi.

a. Masyarakat pengguna hidran umum

Hidran umum adalah suatu jenis hidran yang dikelola oleh perorangan di suatu lokasi dengan sumber air didapat melalui sambungan pipa PAM JAYA berdiameter 1 (satu) inch. Masyarakat pengguna hidran umum adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tinggal di daerah legal settlement (daerah resmi) tetapi mereka tidak memiliki jaringan perpipaan. Untuk dapat melayani masyarakat tersebut maka PAM JAYA dan Mitra Swasta membuat

kebijakan baru yaitu menyalurkan air dengan menggunakan hidran umum. PAM JAYA menunjuk salah satu orang yang tinggal di daerah tersebut dan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi pengelola hidran umum kemudian pengelola hidran memiliki kewenangan untuk menjual airnya kepada masyarakat lain melalui gerobak atau menjual di 1 (satu) tempat agar masyarakat yang membutuhkan bisa datang langsung untuk membeli air. PAM JAYA telah menentukan harga kepada pengelola hidran umum yaitu Rp 1.050/m³ dan pengelola hidran menjual airnya kepada masyarakat setempat dengan harga yang variatif sesuai kesepakatan antara pengelola hidran dengan masyarakat setempat. Sampai bulan Oktober tahun 2014, PAM JAYA dan Mitra Swasta telah memiliki 406 hidran umum yang terbagi menjadi 282 hidran umum milik Palyja dan 124 hidran umum milik Aetra⁸. Hidran umum tersebut tersebar di daerah Tanah Merah, Kampung Deret Cilincing, Marunda, Pulogebang, Tembok Bolong, Kampung Deret Petogogan, Lodan dan Kedaung Kali Angke. Satu pengelola hidran memiliki kira-kira 300 jiwa/pengelola hidran. Jika dikumulatikan maka PAM JAYA dan Mitra Swasta telah melayani sekitar 120.000 masyarakat DKI Jakarta melalui hidran umum.

b. Masyarakat pengguna master meter

Master meter adalah meter besar yang memiliki pipa berdiameter besar dan dikelola oleh komunitas untuk melayani area-area yang tidak resmi (illegal settlement) misalnya masyarakat yang menempati daerah konflik (tanah yang tidak jelas kepemilikannya), daerah bantaran kali, bawah jembatan dan daerah-daerah kumuh lainnya⁹. Masyarakat pengguna master meter adalah masyarakat yang bertempat tinggal di daerah illegal settlement (daerah tidak resmi) baik masyarakat dengan penghasilan tinggi ataupun rendah dan mereka tidak memiliki jaringan perpipaan. Untuk dapat melayani masyarakat tersebut maka PAM

⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Dayanto, Manajer Sub Divisi Pelanggan PAM JAYA pada hari Kamis, 27 November 2014 pukul 09.56 WIB

⁹ *ibid*

JAYA dan Mitra Swasta membuat kebijakan baru dengan membangun master meter. Prosedurnya adalah PAM JAYA menunjuk seseorang yang termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui survey dan dianggap mampu menjadi pelanggan PAM¹⁰. Seseorang yang ditunjuk PAM JAYA untuk menjadi pengelola master meter adalah seseorang yang bertempat tinggal di daerah legal untuk mewakili daerah illegal tersebut karena PAM JAYA tidak diperkenankan untuk melayani daerah illegal. Pendistribusian master meter adalah kekeluargaan yaitu sua kelola antar pengelola master meter dengan masyarakat. Pengelola master meter menggunakan pipa atau selang yang terbuka dan bersifat temporer tetapi bukan merupakan standar pipa milik PAM JAYA. Tarif yang diberikan PAM JAYA kepada pengelola master meter adalah Rp 9.000-Rp 18.000/m³. Sampai tahun 2014 PT Palyja telah memiliki 3 (tiga) master meter yang berlokasi 1 (satu) titik daerah Rawa Bebek-Penjaringan dan 2 (dua) titik daerah Jembatan Besi¹¹. Sedangkan PT Aetra telah memiliki 30 master meter yang tersebar di daerah Tanah Merah, Kali Baru, Ancol Selatan, Papanggo, dan Kampung Beting¹². Total master meter yang dimiliki PAM JAYA dan Mitra Swasta tahun 2014 terdapat 33 pengelola master meter yang melayani kira-kira 300 jiwa/master meter. Jika dikumulatifkan maka PAM JAYA dan Mitra Swasta telah melayani 9.900 masyarakat DKI Jakarta melalui master meter.

c. Masyarakat pelanggan kios air

Kios air adalah program penyediaan air bersih Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terletak di luar jangkauan jaringan air bersih. Sampai dengan tahun 2014 PT Aetra telah

¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ina Susanti, Staff Sub Divisi Distribusi PAM JAYA pada hari Selasa, 25 November 2014 pukul 11.02 WIB

¹¹ Palyja."Master Meter". Diakses dari <http://id.palyja.co.id/berita-dan-kegiatan/air-untuk-semua/master-meter>, pada hari Jumat, 29 Mei 2015 pukul 08.03 WIB

¹² Sukarno, Puput Ady. "Tekan Kebocoran, Aetra Hadirkan 30 Master Meter Di Jakarta Utara". Diakses dari <http://jakarta.bisnis.com/read/20150513/77/432792/tekan-kebocoran-aetra-hadirkan-30-master-meter-di-jakarta-utara>, pada hari Kamis, 28 Mei 2015 pukul 11.13 WIB

membangun 8 (delapan) kios air yang terletak di Jakarta Utara dengan persebaran adalah 3 (tiga) titik di Marunda untuk melayani 300 KK, 2 (dua) titik di Rorotan I untuk melayani 100 KK, 2 (dua) titik di Rorotan II untuk melayani 60 KK dan Rorotan III untuk melayani 35 KK¹³. Tarif yang diberikan pengelola adalah sesuai kesepakatan dengan masyarakat. Rata-rata pengelola kios air milik Aetra memberikan tarif kepada pelanggan seharga Rp 300/20 liter atau Rp 500/20 liter untuk yang diantarkan gerobak kepada pembeli. Sementara PT Palyja sampai tahun 2014 telah memiliki 20 kios air yang tersebar di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kapasitas kios air milik Palyja cukup untuk melayani 200 KK. Tarif air yang diberikan PT Palyja kepada pengelola sebesar Rp 3.550/m³ atau 1.000 liter. Kemudian berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat, pengelola kios milik Palyja menjual air kepada pelanggan sebesar Rp 400/jerigen atau 20 liter dan Rp 500/jerigen jika diantar ke rumah pelanggan. Jika dikumulatifkan maka PAM JAYA dan Mitra Swasta telah melayani sekitar 18.000 masyarakat DKI Jakarta melalui kios air.

3. Hambatan dalam Pelayanan Air di DKI Jakarta

Dalam melayani kebutuhan air bersih masyarakat DKI Jakarta, baik PAM JAYA dan Mitra Swasta mengalami hambatan yang cukup sulit dimulai dari keluhan pelanggan terhadap pelayanan PAM JAYA atau Mitra Swasta sampai pencurian air yang meningkatkan tingkat kebocoran air (NRW).

1. Keluhan pelanggan PAM JAYA dan Mitra Swasta

Pelanggan PAM JAYA dan Mitra Swasta pada umumnya mengeluhkan kualitas air yang keruh, bau, kotor, tekanan air tidak stabil bahkan seringkali air tidak mengalir di pagi hari dan hanya akan

¹³ Sekretariat Redaksi. "Aetra Operasikan 8 Kios Air". Diakses dari <http://industri.bisnis.com/read/20111207/12/55671/aetra-operasikan-8-unit-kios-air>, pada hari Selasa, 26 Mei 2015 pukul 08.35 WIB

mengalir di malam hari sekitar pukul 23.00 . Tidak jarang juga pelanggan mengeluhkan rekening tagihan yang ‘membengkak’. Pelanggan tentunya merasa kecewa dengan pelayanan PAM JAYA dan Mitra Swasta. Kekecewaan pelanggan PAM JAYA dan Mitra Swasta umumnya mereka sampaikan melalui koran, website, media sosial, atau melalui customer service PAM JAYA dan Mitra Swasta.

2. Pencurian Air

Pencurian air merupakan salah satu faktor penghambat distribusi air kepada pelanggan PAM JAYA. Pencurian air menyebabkan pelanggan resmi PAM JAYA kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Selain merugikan pelanggan resmi, pencurian air juga merugikan PAM JAYA, Mitra Swasta dan masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Sampai tahun 2014, untuk wilayah Palyja terdapat 725 titik sambungan illegal non-pelanggan dan 1.054 kasus pencurian air yang dilakukan oleh pelanggan¹⁴. Untuk wilayah Aetra ditemukan 50 titik sambungan illegal¹⁵. Akibat pencurian air Palyja menderita kerugian sebesar Rp 2 milyar¹⁶ sedangkan Aetra menderita kerugian sebesar Rp 6,9 milyar¹⁷. Akibat pencurian air ini juga tingkat kebocoran air (NRW) sulit untuk ditindaklanjuti, pasalnya DKI Jakarta telah kehilangan air sebesar 40% sedangkan Pemerintah telah memberi instruksi kepada PAM JAYA dan Mitra Swasta untuk menurunkan tingkat kebocoran

¹⁴ Chairunnisa, Ninis. "Jumlah Kasus dan Modus Pencurian Air PAM". Diakses dari <http://metro.tempo.co/read/news/2014/09/02/064603850/Jumlah-Kasus-dan-Modus-Pencurian-Air-PAM>, tanggal 29 Mei 2015 pukul 15.08 WIB

¹⁵ Pandia, Andrie S. "Tindak Lanjuti Hasil Sidak di Volker, Aetra Laporkan Pencurian Air ke Polres Jakarta Utara". Diakses dari <http://infojakarta.net/tindak-lanjuti-hasil-sidak-di-volker-aetra-laporkan-pencurian-air-ke-polres-jakarta-utara/>, tanggal 29 Mei 2015 pukul 11.00 WIB

¹⁶ Latief. "Akibat Pencurian, Kerugian Palyja Capai Rp 2 Miliar". Diakses dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/05/11183911/Akibat.Pencurian.Kerugian.Palyja.Capai.Rp.2.Miliar>, tanggal 29 Mei 2015 pukul 15.23 WIB

¹⁷ Yasinta Veronica. "Pencurian Air, Aetra rugi Rp 6,9 miliar". Diakses dari <http://jakarta.bisnis.com/read/20150319/77/413613/pencurian-air-aetra-rugi-rp69-miliar>, tanggal 29 Mei 2015 pukul 19.33 WIB

air hingga mencapai 35%¹⁸. Alasan masyarakat mencuri air pada umumnya untuk keperluan rumah tangga dan keperluan bisnis.

4. Dampak Privatisasi Air di Provinsi DKI Jakarta

Privatisasi air di Provinsi DKI Jakarta telah berjalan selama 16 tahun namun selama itu pula tidak ada hasil yang memuaskan. Dilihat secara singkat memang jumlah pelanggan PAM JAYA meningkat 100% setelah bekerjasama dengan Mitra Swasta tetapi hal tersebut tidak menggambarkan keberhasilan kebijakan ini. Terdapat 4 (empat) aspek yang menjadi faktor keberhasilan privatisasi air di Jakarta yaitu aspek publik, aspek korporasi, aspek legislasi dan aspek pasar.

No	Faktor Keberhasilan	Hasil
1	Aspek Publik	Gugatan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri PU, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, DPRD Propinsi DKI Jakarta, dan PAM JAYA beserta Mitra Swasta (Palyja dan Aetra).
2	Aspek Legislasi dan Aspek Korporasi	Perjanjian kerjasama dengan Mitra Swasta membatasi ruang lingkup PAM JAYA.
3	Aspek Pasar	Kerjasama telah merugikan PAM JAYA serta Negara

¹⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dadang Teguh Suhartono, Manajer Sub Divisi Humas PAM JAYA pada hari Kamis, 20 November 2014 pukul 12.14 WIB

5. Kegagalan Privatisasi Air di Provinsi DKI Jakarta

Menurut Bank Dunia, privatisasi merupakan cara terbaik yang harus diterapkan oleh Negara khususnya Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Indonesia untuk meningkatkan pelayanan terhadap air bersih. Kepadatan penduduk adalah salah satu alasan penerapan kebijakan privatisasi air di DKI Jakarta. Namun penerapan kebijakan privatisasi air tidak seperti yang diharapkan. Dari 4 (empat) aspek yang menjadi faktor keberhasilan privatisasi air di DKI Jakarta, tidak ada satu pun aspek yang berhasil diadopsi oleh Mitra Swasta. Kegagalan keempat aspek tersebut disebabkan luasnya peran Mitra Swasta yang pada akhirnya membatasi peran PAM JAYA sebagai Perusahaan Daerah yang menjadi wakil Pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Minimnya peran PAM JAYA pada akhirnya berdampak kepada masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Kegagalan tersebut telah memberikan kesimpulan bahwa kebijakan Privatisasi Air di Provinsi DKI Jakarta tidak tepat untuk dilakukan dan harus segera dihapuskan karena secara tidak langsung telah melanggar hak asasi manusia atas air bersih. Gugatan masyarakat terhadap pelayanan air bersih telah berhasil dimenangkan dan menjadi titik terang bagi PAM JAYA.

6. Masa Depan Kebijakan Privatisasi Air di Provinsi DKI Jakarta

Sesuai dengan kesepakatan bahwa kerjasama PAM JAYA dan Mitra Swasta dalam melayani kebutuhan air bersih masyarakat DKI Jakarta akan berakhir setelah ulang tahun ke-25 yaitu tahun 2023 (1998-2023). Setelah kerjasama berakhir maka semua asset akan dikembalikan kepada PAM JAYA. kerjasama .

Kebijakan privatisasi belum memasuki tahap akhir namun telah banyak pihak yang jenuh terhadap pelayanan yang diberikan Mitra Swasta. Tahun 2014 adalah titik terang bagi PAM JAYA, pasalnya saham PT Palyja akan dikembalikan kepada PAM JAYA melalui pembelian saham PT Palyja oleh PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alasan mengapa kedua

perusahaan tersebut ikut terlibat dalam kebijakan privatisasi adalah karena PAM JAYA dan Pemerintah tidak dapat memutuskan kontrak kerjasama secara sepihak. Jika PAM JAYA dan Pemerintah memutuskan secara sepihak maka PAM JAYA dan Pemerintah harus bertanggung jawab dengan membayar penalty yaitu biaya operasional yang akan dikeluarkan Mitra Swasta sampai dengan masa kerjasama berakhir dan jumlahnya pun cukup besar .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian tentang akses masyarakat DKI Jakarta terhadap air bersih pasca privatisasi air maka kesimpulan yang diperoleh adalah Kebijakan Privatisasi Air telah gagal diimplementasikan.

Kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan PAM JAYA terhadap kebutuhan air bersih masyarakat Provinsi DKI Jakarta ternyata mengalami kegagalan dalam implementasinya sehingga banyak pihak terutama masyarakat DKI Jakarta yang menuntut Pemerintah agar kebijakan privatisasi air segera dihapuskan karena telah melanggar hak asasi manusia atas air bersih.

Kegagalan tersebut dapat terlihat dari gagalnya Mitra Swasta dalam mengadopsi 4 (empat) aspek yang menjadi faktor keberhasilan privatisasi dan buruknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat provinsi DKI Jakarta serta di dalam organisasi PAM JAYA dan Mitra Swasta pun terdapat pertentangan atas peran masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

LANDASAN HUKUM:

- Peraturan Daerah-Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1992
Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(PAM JAYA)
- Peraturan Daerah-Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 1993
Tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

BUKU:

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kota Optimum, Efisien dan Mandiri*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bastian, Indra. 2002. *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Salemba Emban Patria
- Basyaib, Hamid. 2006. *Membela Kebebasan: Percakapan Tentang Demokrasi Liberal*. Jakarta: Pustaka Alvabet dan Freedom Institute
- Joga, Nirwono dan Yori Antar. 2007. *Komedi Lenong: Satire Ruang Terbuka Hijau*. Jakarta: PT Gramedia
- Kodoatie, Robert J dan Rustam Sjarief. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: Andi Offsite
- KRuHA. 2011. *Transparansi Regulasi Penyediaan Air Minum di DKI Jakarta*. Jakarta: ECOTAS
- Moeljono, Djokosantoso. 2004. *Reinvensi BUMN*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Muchayat. 2010. *Badan Usaha Milik Negara: Retorika, Dinamika, dan Realita (Menuju BUMN yang Berdaya Saing)*. Yogyakarta: Gagasan Bisnis
- Nugroho, Riant dan Randy R. Wrihatnolo. 2008. *Manajemen Privatisasi BUMN*. Jakarta: PT Gramedia

MAKALAH & JURNAL

- Agustina, Dian Vita. 2007. *"Analisa Kinerja Sistem Distribusi Air Bersih PDAM Kecamatan Banyumanik di Perumnas Banyumanik (Studi Kasus Perumnas Banyumanik Kel. Sronдол Wetan)"* Tesis. Semarang: Fakultas Teknik Sipil, Universitas Diponegoro
- AMRTA Institute. 2011. *"Amandemen Kontrak Konsensi Air di Jakarta"*
- . 2014. *Leaflet "Dampak Privatisasi Air Jakarta: Dari Air Mati Sampai Korupsi"*
- BAPPENAS. 2011. *Ironi Air di Indonesia Menyikapi Potensi Perang Air: Belajar Tentang Air dari Swedia*. Sustaining Partnership Media edisi Desember. Jakarta: Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP)
- Djunedi, Praptono. 2007. Kajian Artikel PPP tahun 2007. *"Implementasi Public-Private Partnerships dan Dampaknya ke APBN"*
- Dephut. 2012. *"Profil Kehutanan 33 Provinsi"*
- Fitriani, Asri. 2009. *"Analisa Kinerja Privatisasi pada PD PAM JAYA"* Skripsi. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

- Harsastro, Priyatno. 2012. Jurnal Universitas Diponegoro. “Desentralisasi dan Kerjasama Pemerintah-Swasta”
- Kurniasih, Heni. 2008. Paper “Water Not For All: The Consequences of Water Privatisation in Jakarta, Indonesia”. Melbourne University
- Manar, Dzunuwanus Ghulam. 2009. Majalah Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial. “Krisis Kekuasaan Negara di Balik Privatisasi Air”
- Menzies, Iain dan dan Irma Magdalena Setiono. 2010. *Oba Approaches* Brosur No. 38 Edisi November 2010. “Output-Based Aid di Indonesia: Peningkatan Akses Pelayanan Air bagi Rumah Tangga Miskin di Wilayah Barat Jakarta”
- Prihatin, Rohani Budi. 2013. Jurnal Info Singkat Vol. V, No. 7 April 2013. “Problem Air Bersih di Perkotaan”
- Ruben, Celine. 2008. Paper “Thirsty for Change: Considering Water Privatization in Developing Nations”. Columbia University
- PPP Indonesia. 2011. Leaflet “Public-Private Synergy for Development”.
- The Water Dialogues Indonesia*. 2009

INTERNET:

- Anonim. “Kualitas Air di DKI Jakarta”. Diakses dari <http://www.anakui.com/2008/01/09/kualitas-air-di-dki-jakarta>, pada 20 September 2013 pada 20.55 WIB
- Apriando, Tommy. “Gugatan Hak Atas Air Dimenangkan Warga Jakarta”. Diakses dari <http://www.beritaloka.com/2015/03/gugatan-hak-atas-air-dimenangkan-warga-jakarta>, pada 30 Mei 2015 pukul 09.34 WIB
- Ashari, Fatkhan. 2012. Privatisasi BUMN: Langkah Peningkatan Kualitas Barang dan Pelayanan Publik. Diakses dari http://fatkhan-ashari-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-49972-c.%20Birokrasi-PRIVATISASI%20BUMN:%20Langkah%20%20Peningkatan%20Kualitas%20%20Barang%20dan%20Pelayanan%20Publik.html pada 7 Juli 2014 pukul 19.20 WIB
- Chairunnisa, Ninis. “Jumlah Kasus dan Modus Pencurian Air PAM”. Diakses dari <http://metro.tempo.co/read/news/2014/09/02/064603850/Jumlah-Kasus-dan-Modus-Pencurian-Air-PAM>, tanggal 29 Mei 2015 pukul 15.08 WIB
- Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta. “Geografis Jakarta”. Diakses dari <http://www.jakarta.go.id/v2/news/2008/01/Geografis-Jakarta>, pada tanggal 29 Juni 2015 pukul 10.00 WIB
- Latief. “Akibat Pencurian, Kerugian Palyja Capai Rp 2 Miliar”. Diakses dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/05/11183911/Akibat.Pencurian.Kerugian.Palyja.Capai.Rp.2.Miliar>, tanggal 29 Mei 2015 pukul 15.23 WIB
- Palyja. “Master Meter”. Diakses dari <http://id.palyja.co.id/berita-dan-kegiatan/air-untuk-semua/master-meter>, pada hari Jumat, 29 Mei 2015 pukul 08.03 WIB
- Pandia, Andrie S. “Tindak Lanjuti Hasil Sidak di Volker, Aetra Laporkan Pencurian Air ke Polres Jakarta Utara”. Diakses dari <http://infojakarta.net/tindak-lanjuti-hasil-sidak-di-volker-aetra-laporkan>

[pencurian-air-ke-polres-jakarta-utara/](#), tanggal 29 Mei 2015 pukul 11.00 WIB

Sekretariat Redaksi. "Aetra Operasikan 8 Kios Air". Diakses dari <http://industri.bisnis.com/read/20111207/12/55671/aetra-operasikan-8-unit-kios-air>, pada hari Selasa, 26 Mei 2015 pukul 08.35 WIB

Shofiani, Nur Endah. "*Privatisasi PAM JAYA: Studi Kasus di Jakarta Bagian timur, indonesia*".

http://www.kruha.org/page/id/dinamic_detil/20/30/Artikel/Privatisasi_PAM_Jaya_Studi_Kasus_di_Jakarta_Bagian_Timur_Indonesia.html, diakses tanggal 25 Mei 2015 pukul 11.32 WIB

Sukarno, Puput Ady. "Tekan Kebocoran, Aetra Hadirkan 30 Master Meter Di Jakarta Utara". Diakses dari

<http://jakarta.bisnis.com/read/20150513/77/432792/tekan-kebocoran-aetra-hadirkan-30-master-meter-di-jakarta-utara>, pada hari Kamis, 28 Mei 2015 pukul 11.13 WIB

Suparyanto. "Masalah Air Bersih". Diakses dari

<http://dr-suparyanto.blogspot.com/2014/03/masalah-air-bersih.html>, pada 3 Februari 2015 pukul 09.20 WIB

Yasinta Veronica. "Pencurian Air, Aetra rugi Rp 6,9 miliar". Diakses dari

<http://jakarta.bisnis.com/read/20150319/77/413613/pencurian-air-aetra-rugi-rp69-miliar>, tanggal 29 Mei 2015 pukul 19.33 WIB